

# PERBANDINGAN TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2008 DAN TAHUN 2013

Yan Sinatra<sup>1)</sup>, Isabella<sup>2)</sup>

<sup>1), 2)</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri  
Jl. Jend. Sudirman No. 629 KM.4 Palembang Kode Pos 30129  
Email : [yansinatra@gmail.com](mailto:yansinatra@gmail.com)<sup>1)</sup>, [bella\\_plg@yahoo.com](mailto:bella_plg@yahoo.com)<sup>2)</sup>

## ABSTRACT

*The focus of this study is the comparison of the level of participation of voters on Election Mayor of Palembang in 2008 and in 2013 as well as the factors that influence the level of participation of the voters. While the purpose of this study was to determine and analyze comparative novice voter turnout on Election Mayor of Palembang in 2008 and in 2013 as well as the factors that influence the level of participation of the voters. Overall voter turnout on Election Mayor of Palembang in 2008 as many as 682,445 voters, while at the Election Mayor of Palembang in 2013, overall voter turnout as much as 757 797 voters. Based on these data, it turns voter turnout in the city of Palembang is not too high only around 67% in 2008 while in the year 2013 down to 63%. While the voter turnout for the beginner, the Year 2008 of the number of voters as much as 156 493 people, which gives the percentage voting rights of 70% or 109 545 souls who turn out to vote. Participation rate for the beginner in 2013, the number of voters as many as 283 372 people, which gave voting rights percentage drops to 65% or as much as 184 192 souls who turn out to vote.*

**Key Words:** Participation, Level of Participation, Election Mayor of Palembang

## 1. Pendahuluan

Pemilihan Umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak reformasi telah bertekad untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, dengan cara diadakannya pemilihan langsung yang melibatkan warga negaranya untuk ikut serta dalam proses pemberian suara (*voting*). Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, Pemilihan Anggota DPD hingga Pemilihan Kepala Daerah juga dilaksanakan dengan cara yang demokratis. Di Indonesia sistem ini dikenal dengan nama Pemilihan Umum (pemilu). Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dilakukan dengan rentang waktu 5 tahun sekali dan diselenggarakan oleh suatu komisi pemungutan suara yang independen, dikenal dengan nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa "*Pemilu di selenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*".<sup>1</sup>

Melalui pemilihan umum tersebut, rakyat Indonesia ingin turut serta secara aktif untuk berpartisipasi dalam memilih wakil mereka dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah karena partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik sebagai perwujudan dari kedaulatan

rakyat, karena pada saat pemilu itulah, rakyat menjadi pihak yang paling menentukan bagi proses politik disuatu wilayah dengan memberikan suara secara langsung.<sup>2</sup>

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.<sup>3</sup> Selama periode Orde Baru tingkat partisipasi memilih dalam setiap penyelenggaraan pemilu selalu di atas 90 %. Partisipasi politik di bawah rezim pemerintahan Soeharto dinilai semu, sejumlah faktor yang menggiring pada persepsi ini adalah represi politik dan model mobilisasi yang sangat kuat selama enam periode Pemilu sepanjang 32 tahun pemerintahan Orde Baru. Partisipasi Pemilu pada era Orde Baru memang memiliki kecenderungan turun dalam setiap

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>2</sup> Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kecamatan Kendal*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2010, hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*

penyelenggaraan, tetapi penurunannya tak terlalu signifikan. Pada penyelenggaraan Pemilu pertama di era reformasi, antusiasme pemilih masih tinggi, tercatat lebih dari 92,74 % pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Kota Palembang telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung pada tahun 2008 dan tahun 2013 yang lalu. Pada 2 (dua) kali pelaksanaan Pemilukada tersebut, terjadi penurunan terhadap partisipasi politik pemilih. Pada tahun 2008, angka partisipasi politik pemilih sebesar 682.445 pemilih atau sebanyak 67% yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan pada tahun 2013 lalu, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 757.797 pemilih atau berkisar dalam angka 65% yang menggunakan hak pilihnya.<sup>1</sup> Meskipun pada tahun 2013 angka partisipasi pemilihnya lebih banyak dari tahun 2008, tetapi secara persentase lebih kecil karena perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap pada tahun 2008 dan 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji mengenai perbandingan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 dan Tahun 2013. Mengingat bahwa pemilih pemula sebagaimana disebutkan di atas merupakan segmentasi sasaran yang menjanjikan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu penurunan angka pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "*Perbandingan Tingkat Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 Dan Tahun 2013.*"

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu, bagaimana perbandingan tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 dan Tahun 2013 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula tersebut?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 dan Tahun 2013 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih pemula tersebut.

### Kajian Literatur

Keikutsertaan masyarakat dalam memilih pemimpin adalah upaya untuk menjalankan kehidupan berpolitik, yang secara tidak langsung juga upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pendapat Surbakti memberikan pengertian partisipasi politik ialah segala keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.<sup>2</sup>

Kemudian Menurut Budiardjo menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain seperti memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>3</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam Modul Komisi Pemilihan Umum, yaitu:<sup>4</sup>

"Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Pemilih pemula terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih."

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih adalah:

- a. Umur sudah 17 tahun;
- b. Sudah / pernah kawin; dan
- c. Purnawirawan / Sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Dapat dijelaskan bahwasanya pengenalan proses pemilu sangat penting untuk dilakukan kepada pemilih pemula terutama mereka yang baru berusia 17 tahun. KPU dibantu dengan pihak terkait lainnya harus mampu memberikan kesan awal yang baik tentang pentingnya suara mereka dalam pemilu, bahwa suara mereka dapat menentukan pemerintahan selanjutnya dan meningkatkan kesejahteraan hidup bangsa. Pemahaman yang baik itu diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menjadi pemilih yang cerdas. Pemilih pemula lainnya juga mempunyai peran penting sehingga diperlukan kebijakan strategis yang memudahkan mereka dalam memberikan suara.

Dalam Pemilukada, terdapat 3 (tiga) cara untuk Membaca perilaku pemilih menurut usia yakni :

- a. Pemilih Pemula (17-22 Tahun) Rata-rata terdiri dari 20-30 persen pemilih. Pemilih pemula tidak memiliki kepedulian untuk memilih akan tetapi mudah di pengaruh. Tidak untuk diarahkan memilih akan tapi mudah diarahkan untuk provokasi, bertindak anarkis dan bahkan merusak suasana serta lingkungannya serta dapat mempengaruhi kebijakan. Secara psikologis pemilih pemula lebih suka ramai-ramai sehingga yang dapat mempengaruhi mereka untuk memilih adalah mereka yang di anggap tokoh dan idola (Artis, orang tua, dll) dikarenakan minimnya pendidikan politik dan begitu banyaknya beban pendidikan yang harus mereka kerjakan.
- b. Pemilih Dewasa (22-50 Tahun) Rata-rata terdiri dari 30-40 persen pemilih. Pemilih dewasa lebih ketidakpercayaan mereka terhadap perubahan yang selalu tidak menampilkan perbaikan setelah proses pemilu. Pemilih dewasa cenderung lebih dewasa dalam memberi perbedaan yakni dari perbedaan pendapat, variasi pilihan calon dan perbedaan menentukan parpol. Mereka pemilik massa pemilih dalam konteks politik *tidak bertuan* alias

<sup>1</sup> Data diambil dari Sekretariat KPU Kota Palembang pada tanggal 25 April 2014

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 140

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 367

<sup>4</sup> Modul I Pemilu untuk Pemilih Pemula, Komisi Pemilihan Umum, 2010, hlm. 48

*mengambang*. Mereka cenderung terikat pada hubungan emosional dengan ideologi tertentu. Dengan begitu pemilih dewasa harapan mendapatkan suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideologi atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka. Karena itu pula, dalam laga pilkada, program-program rasional bukan menjadi garapan utama tim pemenang calon kepada pemilih dewasa. Dan dalam kenyataannya, dinamika perilaku pemilih dewasa cenderung lebih terbuka.

- c. Pemilih Orang Tua (50 Tahun ke atas) rata-rata terdiri dari 10-20 persen pemilih. Mereka yang tidak banyak lagi mendapatkan pengetahuan politik dan bahkan tidak tahu pemimpin dan kepemimpinan karena usianya. Sehingga mereka kurang menilai segala penyelewengan padahal partai / figur yang di dukunginya melakukan apa saja yang sewenang-wenang. Karena usianya mereka tidak dapat menegur / memperbaiki kesalahan – kesalahan figur/ partai alias lebih cenderung pasrah. Akhirnya pemilih tua akan mudah diarahkan untuk tujuan suara atau memilih. Makin tua biasanya akan makin konservatif yakni cenderung berpandangan positif terhadap kekuatan dominan yang menjanjikan stabilitas.

### Teori Sosialisasi

Menurut beberapa ahli mendefinisikan sosialisasi sebagai berikut:<sup>1</sup>

- Edward Shils, sosialisasi merupakan proses yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang diperlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seseorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut.
- Berger, sosialisasi adalah proses seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat.
- Horton dan Hunt, sosialisasi adalah suatu proses seseorang menghayati (*internalize*) norma-norma kelompok tempat ia hidup sehingga timbul diri yang unik.
- Nursal, Luth, sosialisasi adalah suatu proses ketika individu menerima dan menyesuaikan diri dengan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana seorang individu belajar menghayati berbagai macam nilai, norma, sikap dan pola perilaku dalam masyarakat sehingga ia dapat menjadi anggota masyarakat yang berpartisipasi.

Pandangan lain mengenai sosialisasi adalah menekankan pada peran interaksi dalam proses sosialisasi yang tertuang dari dalam buah pikiran Charles H. Cooley dimana seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain diberi nama *lookingglass self*. Artinya ia melihat analogi antara

pembentukan diri seseorang dengan perilaku orang yang sedang bercermin, maka diri seseorang pun memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya.<sup>2</sup>

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data. Pertama, yaitu kajian literatur yang menggunakan studi kepustakaan atau analisis dokumen yakni data yang bersifat sekunder dan bersumber dari literatur kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal, koran, majalah, skripsi, tesis, disertasi atau jenis tulisan lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data tersebut guna mendukung atau melengkapi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara.

Sedangkan data primer, didapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang dianggap memahami, menguasai pokok-pokok permasalahan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini. Adapun narasumber dalam penelitian ini, yaitu Kepala Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dan Kepala/Sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

## 2. Pembahasan

Dalam bab ini, penulis telah melakukan penelitian dengan metode wawancara untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2008 dan Tahun 2013. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Karim Nasution, selaku Divisi Teknis Penyelenggara, Data dan Informasi di KPU Kota Palembang, yang menyebutkan bahwa:<sup>3</sup>

Tingkat partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu dan Pilukada dapat diukur menjadi 4 (empat) indikator, antara lain:

- Pada saat hari pencoblosoan atau pemberian suara.
- Pada saat pelaksanaan kampanye.
- Rasa keingintahuan pemilih pemula tersebut.
- Partisipasinya menjadi pengurus organisasi atau partai politik.

Berikut ini akan dijabarkan lebih lanjut hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap indikator-indikator yang disampaikan oleh informan untuk mengetahui perbandingan tingkat partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilihan Walikota Tahun 2008 dan Tahun 2013.

### a) Pemberian Suara

Pemahaman arti demokrasi yang makin luas di kalangan masyarakat memberikan pengaruh yang berarti bagi dinamika politik bangsa. Salah satu indikator berjalannya politik secara demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Untuk

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 68

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Nasution, Divisi Teknis Penyelenggara, Data dan Informasi KPU Kota Palembang, pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13.30

<sup>1</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, PT. Setia Purnama, Jakarta, 2007, hlm. 66

mengukur hal itu, kita biasa mengamati bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat kita, selalu ada perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dihindari. Demikian juga dalam bidang politik, tentunya masing-masing individu memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat persoalan.

Pemilih pemula di Kota Palembang belum sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari pihak penyelenggara. Selain itu pemilih pemula melakukan pemberian suara hanya berdasarkan ingin memilih saja karena para pemilih proses pemberian suara karena pemilih pemula di Kota Palembang ingin merasakan memilih wakilnya secara langsung.

Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 merupakan pemilihan secara langsung yang pertama kali untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan di Kota Palembang. Adapun jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 digambarkan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008**

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		Lk	Pr	JLH	
1	2	2	3	4	5
1	AAL	26.122	26.503	52.625	130
2	BUKIT KECIL	18.527	17.989	36.516	78
3	GANDUS	19.703	18.912	38.615	91
4	ILIR BARAT 1	45.669	44.441	90.110	241
5	ILIR BARAT 2	24.822	22.616	47.438	142
6	ILIR TIMUR 1	31.925	31.234	63.159	146
7	ILIR TIMUR 2	63.335	61.068	124.403	300
8	KALIDONI	38.095	34.743	72.838	200
9	KEMUNING	32.023	31.507	63.530	146
10	KERTAPATI	28.433	26.961	55.394	146
11	PLAJU	29.283	30.078	59.361	161
12	SAKO	27.391	27.925	55.316	148
13	SEBERANGULU 1	58.167	55.586	113.753	288
14	SEBERANGULU 2	31.816	30.151	61.967	156
15	SEMATANG BORANG	10.773	9.641	20.414	56
16	SUKARAMI	45.526	42.326	87.852	240
JUMLAH		531.610	511.681	1.043.291	2.669

Sedangkan jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013 digambarkan sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Berdasarkan perbandingan terhadap Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih terdaftar pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 sebanyak 1.043.291 jiwa, sedangkan pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013 jumlah pemilih terdaftar sebanyak 1.133.486 jiwa, hal tersebut mengartikan bahwa telah terjadi kenaikan jumlah pemilih sebanyak 90.195 jiwa.

**Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013**

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	TPS	KETERANGAN
1.	ILIR BARAT II	50.229	115	-
2.	SEBERANGULU I	122.125	283	1 TPS Khazanah (5 Ulu; RS BARD)
3.	SEBERANGULU II	69.876	159	1 TPS Khazanah (13 Ulu; RS Muhammadiyah)
4.	ILIR BARAT I	95.980	224	4 TPS Khazanah (L. Paljo; 2 TPS RS Khodijah + RS Siliwangi, S. Agung; 1 TPS LP Paljo; DLD) 1 TPS Wanda)
5.	ILIR TIMUR I	57.666	125	1 TPS Khazanah (Sci Pangiran) 1 TPS RS Chantia)
6.	ILIR TIMUR II	128.784	302	2 TPS Khazanah (8 Ilir Permat 1 Ilir, P. Komaro)
7.	SUKARANI	105.227	239	-
8.	SAKO	62.667	145	-
9.	KEMUNING	62.066	145	2 TPS Khazanah (20 Ilir II; 1 TPS RS Marina, S. Jaya; TPS RUMAH)
10.	KALIDONI	82.557	191	1 TPS Khazanah (Sci Salazar) 1 TPS RS Pusi)
11.	BUKIT KECIL	22.618	80	1 TPS Khazanah (19 Ilir; 2 TPS LP Merdeka)
12.	GANDUS	42.152	105	-
13.	KERTAPATI	62.094	145	-
14.	PLAJU	62.704	155	-
15.	AAL	60.975	140	-
16.	SEMATANG BORANG	25.857	63	1 TPS Khazanah (K. Mulyo; LP Mataramak)
JUMLAH		1.133.486	2.650	11 TPS Khazanah (2 TPS Khazanah)

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Karim Nasution, yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

Jumlah pemilih terdaftar pada Tahun 2008, rata-rata pemilih pemula jumlahnya hanya sebesar 15% dari jumlah pemilih terdaftar yaitu sebesar 156.493 jiwa pemilih pemula. Sementara pada Tahun 2013, terjadi kenaikan terhadap rata-rata jumlah pemilih pemula di tiap kecamatan dari total jumlah pemilih terdaftar sebesar 25% atau berada pada angka 283.372 jiwa pemilih pemula.

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diambil dari Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang, beliau menjelaskan bahwa:<sup>2</sup>

Tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 sebanyak 682.445 pemilih, sementara pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan sebanyak 757.797 pemilih.

Berdasarkan data tersebut, ternyata tingkat partisipasi pemilih di Kota Palembang tidak terlalu tinggi hanya sekitar 67% pada Tahun 2008 sementara pada Tahun 2013 turun menjadi 63%.<sup>3</sup> Sementara untuk tingkat partisipasi pemilih pemula, pada Tahun 2008 dari jumlah pemilih pemula sebanyak 156.493 jiwa, yang memberikan hak pilihnya persentasenya sebesar 70% atau 109.545 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Sedangkan tingkat partisipasi pemula untuk Tahun 2013, dari jumlah pemilih pemula sebanyak 283.372 jiwa,

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Nasution, Divisi Teknis Penyelenggara, Data dan Informasi KPU Kota Palembang, pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13.30

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang memberikan hak pilihnya persentasenya turun menjadi 65% atau sebanyak 184.192 jiwa yang menggunakan hak pilihnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa meskipun terjadi penurunan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang di Tahun 2008 dengan Tahun 2013, namun sebenarnya jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya meningkat, hal tersebut dikarenakan jumlah pemilih terdaftar yang meningkat dari Tahun 2008 ke Tahun 2013, sehingga menyebabkan meskipun persentasenya turun namun jumlah riil tingkat partisipasi pemilih pemula meningkat. Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Yudha Mahrom bahwa:<sup>2</sup>

Sosialisasi-sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang lebih intens dilakukan di Tahun 2013, berbeda halnya pada Tahun 2008.

Sependapat dengan hal tersebut, Penulis juga beranggapan bahwa Dapat dimaklumi bahwa pada Tahun 2008, sosial-sosial media belum banyak menjamur seperti pada Tahun 2013 terutama perkembangan teknologi yang begitu pesat. Meskipun tidak sepenuhnya melaksanakan sosialisasi melalui sosial media, paling tidak para pemilih rata-rata menggunakan sosial media sehingga memudahkan KPU Kota Palembang melakukan sosialisasi.

#### b) Kampanye

Kampanye pemilu adalah kegiatan organisasi peserta pemilu yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia untuk mempengaruhi pemilih dalam rangka usaha memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam sebuah pemilu. Kampanye adalah salah satu bagian yang penting dalam kegiatan pemilu. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para kandidat untuk menarik simpati masyarakat seperti konvoi damai, panggung terbuka, serta pemberian bantuan pembangunan tempat-tempat umum seperti masjid.

Anggapan pemilih pemula Kota Palembang bahwa kampanye merupakan sesuatu kegiatan yang menyita waktu yang banyak dan harus mengalahkannya segala rutinitas dan kegiatan mereka sehari-hari mengakibatkan para pemilih pemula enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Pemilih pemula yang lain beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon yang mereka dukung. Namun ada pula yang beralasan bahwa pemilu merupakan kegiatan sekedar hura-hura dan ajang untuk berkumpul dengan teman-teman saja tidak mempedulikan arti dari kegiatan kampanye yang sesungguhnya.

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Yudha Mahrom, Divisi Sosialisasi, Anggaran, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KPU Kota Palembang, pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 15.00

Dalam kegiatan kampanye pemilih pemula di Kota Palembang mereka mengikuti kegiatan kampanye sudah sesuai dengan tujuan kampanye yang sebenarnya karena dalam kegiatan tersebut tidak hanya mencari hiburan saja namun untuk mendukung calon tertentu. Kegiatan kampanye yang diikuti oleh pemilih pemula di Kota Palembang pada umumnya dilakukan di luar ruangan seperti konvoi, atau di lapangan terbuka karena mereka beralasan bahwa kampanye yang dilakukan di luar ruangan lebih menarik daripada kegiatan kampanye yang dilakukan di dalam ruangan dan hiburan yang disajikan dalam rangkaian kegiatan kampanye biasanya lebih menarik di luar ruangan daripada di dalam ruangan.

Faktor yang paling mempengaruhi minat pemilih pemula adalah sosok calonnya. Calonnya biasanya sudah dikenal luas, jika belum terlalu dikenal biasanya pemilih pemula enggan untuk mencari tahu perihal rekam jejak calon tersebut. Hal tersebut merupakan sisi psikologis dari pemilih pemula yang masih muda sehingga masih sangat acuh.

Perbandingan calon pada Tahun 2008 dan Tahun 2013 adalah pada Tahun 2008 calonnya lebih banyak sementara pada Tahun 2013 hanya 3 (tiga) pasangan calon sehingga di Tahun 2013 persaingannya lebih kompetitif, terlebih lagi hasil di Tahun 2013 hanya selisih 8 (delapan) suara. Hanya saja kendala pada saat kampanye bagi pemilih pemula adalah sebagian besar pemilih pemula masih dalam masa studi di sekolah, sehingga tidak dibenarkan untuk mengikuti kampanye, kecuali memang masa studi di sekolah telah berakhir.

#### c) Berbicara Masalah Politik

Pemilihan Kepala Daerah merupakan acara lima tahunan yang diselenggarakan oleh Negara atau Pemerintah Daerah guna melaksanakan amanat konstitusi. Media masa maupun layar televisi setiap hari membicarakan hal ini, pada Pemilu pada Tahun 2008 pemilih pemula di Kota Palembang secara umum belum begitu banyak yang membicarakan mengenai masalah pemilu dengan teman-temannya maupun anggota masyarakat yang lain hal ini dikarenakan belum begitu memikirkan pentingnya sebuah pemilu bagi kelangsungan demokrasi Negara, namun pada Tahun 2013 sebagian dari pemilih pemula di Kota Palembang sudah sering membicarakan masalah mengenai Pemilihan Walikota Tahun 2013 ini dengan teman-temannya di sela-sela kegiatannya sehari-hari.

Membicarakan masalah politik biasanya dilakukan di berbagai tempat seperti di tempat kerja maupun sekolah dan pembicaraan dilakukan dengan teman-teman dekat mereka. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam rangka mengakomodir hal tersebut melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan cara melaksanakan kegiatan *focus group discussion* atau seminar-seminar yang melibatkan pemilih pemula.<sup>3</sup> Berikut ini akan disajikan beberapa gambar-gambar mengenai sosialisasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang.

#### d) Sebagai Pengurus Partai Politik

Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah memberi dampak positif bagi masyarakat atau warga negara dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik sangatlah penting bagi masyarakat khususnya pemilih pemula, karena pemilih pemula merupakan generasi penerus bangsa. Pendidikan politik masyarakat termasuk pemilih pemula di dalamnya dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas politik mereka, hal tersebut juga dapat dilihat dari keaktifan mereka sebagai pengurus anggota partai politik. Untuk indikator ini, pemilih pemula di Kota Palembang masih belum terlalu banyak terlibat dalam kepengurusan atau kegiatan partai politik, sebab berdasarkan penuturan Bapak Abdul Karim Nasution bahwa:<sup>1</sup>

Hal tersebut bukan menjadi ranah Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk mengurus hal tersebut, itu masuk *domain* partai politik. Itu menjadi urusan pribadi dari para pemilih, apa mereka ingin terlibat di partai politik atau tidak.

Sependapat dengan pernyataan tersebut, Penulis menilai bahwa Pada tataran kualitas sebagai pengurus partai politik, pemilih pemula belum mempunyai kualitas atau pengalaman sebagai seorang elit partai politik sehingga memang bukan menjadi urusan Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan siapa siapa yang harus masuk partai politik. Selain itu, partai politik memiliki mekanisme dan sistem kepengurusannya masing-masing.

#### e) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Palembang

Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Begitu juga dengan pemilih pemula yang baru memasuki usia hak pilih sebagian besar belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih.

#### f) Faktor Penghambat Partisipasi Politik Pemilih Pemula

##### 1. Kesibukan Kegiatan Sehari-hari

Perlu diketahui bersama bahwa kelompok pemilih pemula yang berentang usia 17-21 tahun yang berada di Kota Palembang kelompok ini banyak terangkum dalam kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda. Peranan pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu

menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilihan umum. Mereka lebih memilih untuk melaksanakan kegiatan mereka daripada harus ikut serta dalam urusan pemilu.

##### 2. Perasaan Tidak Mampu

Keikutsertaan pemilih pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemula adalah suatu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun di dalamnya adalah orang-orang kaya, berpendidikan, ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik tahan air.

Perasaan tidak mampu atau minder ini biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi yang rendah. Menurut Mohtar Mas'ood di samping pendidikan dan sosial ekonomi perbedaan jenis kelamin juga mempengaruhi keaktifan seorang dalam berpartisipasi politik. Misalnya, laki-laki lebih aktif berpartisipasi daripada wanita, orang yang berstatus sosial ekonomi tinggi lebih aktif daripada yang berstatus rendah.<sup>2</sup>

Mereka merasa tidak berhak tampil dalam kegiatan politik dari pada mereka yang punya setatus sosial ekonomi yang tinggi dan pengalaman yang memadai. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan mempunyai setatus sosial ekonomi yang cukup. Dengan adanya gejala seperti ini mereka akan merasa lebih aman dan nyaman jika hanya berada di sektor privat.

##### 3. Larangan Dari Pihak Keluarga

Falsafah ketimuran bagi masyarakat Kota Palembang masih di junjung dengan teguh. Mereka masih mementingkan keluarga di atas kepentingan yang lain. Jadi ketika anggota keluarga yang lain tidak setuju dengan suatu aktivitas yang kita lakukan, maka lebih baik berhenti melakukannya. Demikian juga dengan aktivitas politik pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota Palembang, ketika anggota keluarga ada yang melarang, maka mereka akan segera mematuhi.

Pihak keluarga adalah faktor yang berpengaruh besar dalam kehidupan seseorang. Pihak keluarga dapat mendukung atau bahkan menentang perilaku anggota keluarganya yang lain. Jika pihak keluarga sudah tidak mendukung keputusan seseorang, maka orang tersebut lebih banyak mengurungkan niatnya. Dalam hal ini, sebenarnya pihak keluarga dapat menjadi pengaruh atau perangsang utama bagi seseorang untuk berpartisipasi politik namun ternyata pihak keluarga justru melarang, maka partisipasi politik tidak akan terwujud.

#### g) Faktor Pendorong Partisipasi Politik Pemilih Pemula

##### 1. Rasa Ingin Tahu

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Abdul Karim Nasution, Divisi Teknis Penyelenggara, Data dan Informasi KPU Kota Palembang, pada tanggal 13 Maret 2014 pukul 13.30

<sup>2</sup> Mas'ood Mochtar dan Colin Mac Andrew, *Ibid.*

Pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang belum mempunyai pengalaman dalam pesta demokrasi. Dan kesemarakannya pemilu di negeri ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi kelompok pemilih pemula. Pengalaman yang sangat minim dalam pesta demokrasi yang mulai berkembang di negeri ini menjadikan kelompok pemilih pemula ingin ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam kegiatan pemilu.

Pemilih pemula yang sebelumnya hanya sebagai penonton proses politik dalam Pemilu dan Pemilukada, kini mereka akan menjadi pelaku atau pemilih yang akan menentukan terpilihnya seorang pemimpin. Dari sinilah rasa keinginannya pemilih pemula untuk ikut andil dalam pesta demokrasi dan ingin merasakan secara langsung keterlibatan mereka dalam pemilu.

Miriam Budiarto menyebutkan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemilih pemula di Kota Palembang secara langsung sudah ikut dalam berpartisipasi politik secara aktif yaitu dengan cara memilih pemimpin dalam proses pemilu, dan kegiatan pemilihan umum yang dilakukan oleh pemilih pemula di Kota Palembang sudah termasuk dalam kategori berpartisipasi politik karena secara tidak langsung kegiatan pemilihan umum yang dilakukan sudah mempengaruhi kebijakan negara.

## 2. Kesadaran Politik Para Pemilih

Kesadaran pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilukada di Kota Palembang cukup banyak. Mereka menganggap bahwa peran serta mereka untuk mensukseskan pemilu harus mereka lakukan karena mereka juga adalah bagian dari Warga Negara Indonesia. Anggapan pemilih pemula Kota Palembang bahwa orang yang sudah cukup umur dan sudah terdaftar dan diberi undangan untuk datang ke TPS adalah suatu keharusan.

Pemilih pemula di Kota Palembang sudah banyak yang mempunyai keinginan bahwa mereka harus mensukseskan Pemilihan Walikota Palembang yang diselenggarakan untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih baik. Kenyataan ini menyebabkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan umum, khususnya pemungutan suara. Kesadaran karena adanya kewajiban inilah yang membuat mereka ikut serta dalam kegiatan pemilu. Maka partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Walikota Palembang di Kota Palembang dapat dikategorikan dalam kelompok spektator. Karena kesadaran politik mereka meningkat walaupun hanya sekedar ikut dalam kegiatan pemilihan umum.

## 3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 dan Tahun 2013 yaitu secara keseluruhan pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2008 sebanyak 682.445 pemilih, sementara pada Pemilihan Walikota Palembang Tahun 2013, tingkat partisipasi pemilih secara keseluruhan sebanyak 757.797 pemilih. Berdasarkan data tersebut, ternyata tingkat partisipasi pemilih di Kota Palembang tidak terlalu tinggi hanya sekitar 67% pada Tahun 2008 sementara pada Tahun 2013 turun menjadi 63%. Sedangkan untuk tingkat partisipasi pemilih pemula, pada Tahun 2008 dari jumlah pemilih pemula sebanyak 156.493 jiwa, yang memberikan hak pilihnya persentasenya sebesar 70% atau 109.545 jiwa yang menggunakan hak pilihnya.

Sedangkan tingkat partisipasi pemula untuk Tahun 2013, dari jumlah pemilih pemula sebanyak 283.372 jiwa, yang memberikan hak pilihnya persentasenya turun menjadi 65% atau sebanyak 184.192 jiwa yang menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan data yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa meskipun terjadi penurunan terhadap tingkat partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Walikota Palembang di Tahun 2008 dengan Tahun 2013, namun sebenarnya jumlah pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya meningkat, hal tersebut dikarenakan jumlah pemilih terdaftar yang meningkat dari Tahun 2008 ke Tahun 2013, sehingga menyebabkan meskipun persentasenya turun namun jumlah riil tingkat partisipasi pemilih pemula meningkat. Hal tersebut ditambahkan oleh Bapak Yudha Mahrom bahwa sosialisasi-sosialisasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang lebih intens dilakukan di Tahun 2013, berbeda halnya pada Tahun 2008.

Salah satu faktor yang mempengaruhi minat pemilih pemula adalah sosok calonnya. Perbandingan calon pada Tahun 2008 dan Tahun 2013 adalah pada Tahun 2008 calonnya lebih banyak sementara pada Tahun 2013 hanya 3 (tiga) pasangan calon sehingga di Tahun 2013 persaingannya lebih kompetitif, terlebih lagi hasil di Tahun 2013 hanya selisih 8 (delapan) suara. Hanya saja kendala pada saat kampanye bagi pemilih pemula adalah sebagian besar pemilih pemula masih dalam masa studi di sekolah, sehingga tidak dibenarkan untuk mengikuti kampanye, kecuali memang masa studi di sekolah telah berakhir. Membicarakan masalah politik biasanya dilakukan di berbagai tempat seperti di tempat kerja maupun sekolah dan pembicaraan dilakukan dengan teman-teman dekat mereka. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang dalam rangka mengakomodir hal tersebut melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan cara melaksanakan kegiatan *focus group discussion* atau seminar-seminar yang melibatkan pemilih pemula. Pemilih pemula di Kota Palembang masih belum terlalu banyak terlibat dalam kepengurusan atau kegiatan partai politik, sebab berdasarkan penuturan Bapak Abdul Karim Nasution bahwa hal tersebut bukan menjadi ranah

Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang untuk mengurus hal tersebut, itu masuk *domain* partai politik.

#### DaftarPustaka

- [1] Sudiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] -----, 2008. *Partisipasi dan Partai Poitik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [3] Dani, Wahyu Rahma. 2010. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kecamatan Kendal*. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- [4] Hermawan, Eman. 2001. *Politik Membela Yang Benar*. Yogyakarta: Yayasan KLIK.
- [5] Huntington, Samuel dan Juan M. Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [7] Modul I Pemilu untuk Pemilih Pemula. 2010. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- [8] Mochtar, Mas'ood dan Colin Mac Andrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- [9] Moleong, Lexy. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- [10] Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- [11] Suryadi, Budi. 2007. *Sosiologi Politik Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- [12] Rahman H, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [13] Usman, Husaini, dkk. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [14] Waluya, Bagja. 2007. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Jakarta: PT. Setia Purnama